**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAWANAN PERANG
BERDASARKAN KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949
DAN *DECLARATION OF HUMAN RIGHTS***

**Oleh :
Lona Puspita, SH.MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang**

Abstrack

The Geneva Convention III provides that the Defense State is responsible for the treatment granted to its detainees. The prisoner is a prisoner of the enemy State that is a person - a person who is a combatant from an enemy State. Combatants The enemy nation has a legal protection and still gets its rights, but the protection has not been done well because there is still a lot of violence going on with them. This paper describes the legal protection of prisoners of war in terms of Geneva Convention III and Declaration of Human Rights.

Keywords: Legal Protection, Prisoner of War, International Humanitarian Law

Abstrak

Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa Negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanananya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan Negara musuh yaitu orang – perorangan yang merupakan kombatan dari Negara musuh. Kombatan Negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi perlindungan itu belum terlaksana dengan baik karena masih banyak kekerasan yang terjadi pada mereka. Tulisan ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap tawanan perang ditinjau dari Konvensi Jenewa III dan Declaration of Human Rights..

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tawanan Perang, Hukum Humaniter Internasional

Pendahuluan

Istilah Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *International Humanitarian Law*. Istilah lain yang kadang – kadang dipakai ialah hukum sengketa bersenjata (*the law of armed conflict*). Sebelum perang dunia istilah yang lazimnya

dipakai ialah hukum perang (*the law of war*), juga di lingkungan angkatan bersenjata (*armed forces*) dibanyak negara biasanya digunakan istilah hukum perang.¹

Perubahan istilah ini dikarenakan istilah hukum perang (*the law of war*) memiliki konotasi yuridis yakni perang adalah sengketa bersenjata yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan harus adanya pernyataan perang, padahal dalam kenyataannya masih ada pertikaian bersenjata yang tidak melibatkan negara dan tidak didahului dengan pernyataan perang, sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian tidak dapat dilindungi dari Hukum Internasional dibidang perang karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena istilah hukum perang terikat oleh syarat-syarat tertentu maka dipilih istilah yang dianggap netral yang dapat melindungi semua pihak yaitu Hukum Pertikaian Bersenjata (*the law of armed conflict*). Kemudian dalam perkembangannya Hukum Pertikaian Bersenjata dimasuki prinsip-prinsip kemanusiaan maka istilah Hukum Pertikaian Bersenjata dirubah namanya menjadi Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).²

Konflik bersenjata dapat berupa konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Akibat konflik bersenjata banyak menimbulkan korban, baik kombatan maupun penduduk sipil., maka konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa konvensi seperti konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war*) terdiri atas 4 Konvensi, yaitu :

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, of August 12, 1949).
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, of August 12, 1949).

¹ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012, hlm. 1.

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 728

3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*, of August 12, 1949).
4. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War*, of August 12, 1949).

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya dan juga tawanan perang. Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh.³ Dalam hal ini *kombatan* negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya. Namun dalam kenyataannya, tawanan perang tidaklah mendapat hak-haknya selayaknya manusia. Banyak diantara mereka disiksa, di cambuk, di bunuh, di jadikan budak dan sebagainya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Konvensi Jenewa III dimana negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan terhadap tawanannya. Tentara regular dapat menikmati jaminan hukum yang ditetapkan seperti karena cedera atau karena keinginan sendiri dengan cara membuang senjata. Kriteria ini juga diberikan bagi angkatan perang regular yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara menahan⁴.

Berdasarkan hal demikian diperlukan analisis terhadap aturan-aturan dalam Konvensi Jenewa III tersebut sehingga tawanan perang memperoleh hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Konvensi.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949 (*Relative to The Treatment of Prisoners of War*)

Salah satu hal mendasar dalam Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disingkat HHI adalah bahwa dalam konflik bersenjata satu-satunya tindakan yang dapat diterima adalah melemahkan potensi militer musuh. Hal ini mensyaratkan bahwa HHI

³ Pasal 12 Konvensi Jenewa III

⁴ Lia Yulia, Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2015, hal 280

memiliki potensi untuk mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai kombatan dan yang karenanya dapat menyerang atau diserang dan berpartisipasi langsung dalam peperangan⁵.

Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh. Dalam hal ini *kombatan* negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya.

Perlindungan hukum terhadap *kombatan* yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum, meliputi :⁶

1. Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta Konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya.
2. Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, terhadap penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang ataupun menyiksa dan memaksa tawanan perang untuk memberikan suatu keterangan/informasi.
3. Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang

⁵ *Ibid*, hal 282

⁶ Ria Wierma, *Op.Cit*, hlm. 26-28

patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan yang baik dan berbeda dibanding perlakuan yang diberikan kepada pria.

4. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka.

Selanjutnya perlindungan khusus yang harus diberikan kepada tawanan perang, adalah meliputi:

- a. Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu⁷.
- b. Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan serta perlindungan dari bahaya. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara⁸.
- c. Kesehatan dan pengamatan kesehatan pribadi tawanan perang harus terjamin. Setiap kamp tawanan harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi syarat di mana tawanan perang dapat memperoleh pengamatan kesehatan yang mereka perlukan, begitupun juga makanan yang tepat⁹.
- d. Tawanan perang harus diberi tempat tinggal yang layak dan baik¹⁰.
- e. Negara penahan memperkerjakan tawanan perang secara manusiawi dengan memperhatikan umur, jenis kelamin¹¹.

Pasal 4 ayat 2 Konvensi Jenewa III Tahun 1949 juga memberikan status tawanan perang terhadap anggota milisi serta anggota dari barisan sukarela lainnya yang beroperasi didalam atau diluar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, selama mereka memenuhi syarat dalam Pasal 1 Piagam Den Haag Tahun 1907 yaitu:

⁷ Pasal 19 Konvensi Jenewa III

⁸ Pasal 22-23 Konvensi Jenewa III

⁹ Pasal 29-30 Konvensi Jenewa III

¹⁰ Pasal 24-77 Konvensi Jenewa III

¹¹ Pasal 49 Konvensi Jenewa III

- a. Prajurit tersebut berada dibawah komando seorang yang bertanggungjawab terhadap bawahannya.
- b. Mereka memiliki tanda pengenal yang tetap dan dapat dikenal dari kejauhan.
- c. Membawa senjata mereka secara terang-terangan.
- d. Dalam melaksanakan operasi militer patuh terhadap hukum-hukum dan kebiasaan perang.

Pasal 4 ayat 6 Konvensi Jenewa III tahun 1949 juga memberikan status tawanan perang terhadap penduduk suatu wilayah yang belum jatuh, ketika musuh mendekat, mereka bangkit melakukan perlawanan terhadap pasukan yang menyerang asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan perang.

Perlindungan terhadap tawanan perang adalah hal yang sangat penting diperhatikan saat terjadinya konflik bersenjata, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan tidak manusiawi. Dalam sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi dapat dibagi kombatan dan non-kombatan. Demikian halnya kombatan yang telah berstatus "*Hors de combat*"¹² harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Penghormatan pada dasarnya bersifat pasif yaitu kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, tidak memperparah keadaan dan tidak membunuh orang yang dilindungi.

Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan *Declaration of Human Rights* menandai titik awal kodifikasi hukum perlindungan perang pada zaman modern. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kelalaian Negara penahan yang mengakibatkan kematian atau benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada dibawah pengawasannya, adalah dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konvensi ini.

Faktanya, perlindungan bagi orang yang dilindungi masih belum sesuai dengan Konvensi Jenewa III tahun 1949, bahwa banyak orang-orang yang harus dilindungi terutama tawanan perang tidak diperlakukan secara manusiawi. Contohnya seperti yang terjadi di Penjara Guantanamo di wilayah Kuba, Amerika Latin dimana terjadi penyiksaan terhadap para tahanan Guantanamo dan Abu Ghraib oleh Tentara AS. Dalam Film dan foto-foto yang kemudian ditayangkan oleh televisi CBS Amerika Tanggal 29 April 2004 terbukti bahwa

¹² Arlina Permanasari et.al. Pengantar Hukum Humaniter, 1999, Jakarta: ICRC, Hal 163

para sipir militer AS secara brutal menyiksa fisik dan mental para tahanan. Selain itu juga terdapat perlakuan yang tidak manusiawi pada seorang tawanan yang mengaku ditelanjangi dan diancam diperkosa, sementara tangan dan kakinya dirantai dan kepalanya ditutupi kain. Banyak juga tahanan dipaksa minum air hingga muntah darah. Beberapa tahanan juga mengatakan mereka diperkosa, dipukuli, setelah itu dibiarkan dalam keadaan telanjang selama beberapa hari¹³.

Adapun teknik-teknik interogasi sipir militer AS Dalam Penjara Guantanamo dan di penjara abu ghraib meliputi :¹⁴

- a. *Isolation*. Tahanan ditinggalkan atau diisolasi di sebuah ruangan khusus isolasi, sampai ia mengalami kegelisahan dan timbul keinginan yang sangat besar untuk berinteraksi.
- b. *Sleep Deprivation*. Tahanan disiksa dengan cara Dilarang tidur selama beberapa hari. Jika sudah sampai di hari tertentu tahanan akhirnya dibolehkan tidur, tetapi waktunya sangat sebentar dan langsung dibangunkan lagi. Hal tersebut bisa membuat tahanan sangat pusing dan membuat pandangannya kabur. Apalagi selama menjalani masa pemaksaan tidak tidur, porsi makanan tahanan sangat dibatasi.
- c. *Sensory Deprivation*. Tempat semacam tabung yang dibuat khusus untuk tahanan dalam menjalani siksaan agar mau berbicara. Tabung tersebut hanya diberi lubang untuk bernafas. Selama dalam tabung, tahanan akan mengalami depresi yang sangat berat dan akan dikeluarkan jika dia mau berbicara.
- d. *Stress Position*. Tahanan dipaksa untuk berdiri selama berjam-jam. Selain itu, banyak metode lain yang menjadi tambahan dalam penyiksaan jenis ini. Salah satunya adalah berdiri tanpa pegangan dan kedua kakinya harus diangkat.
- e. *Sensory Bombardment*. Tahanan ditaruh di dalam suatu ruangan lalu diberi cahaya yang amat silau dan suara-suara yang keras, membuat tahanan mengalami gangguan pada berbagai indranya dan bisa kehilangan konsentrasi.
- f. *Forced Nudity*. Tahanan dikumpulkan lalu dipanggil salah satu dari mereka dan ditelanjangi. Tahanan yang ditelanjangi diinterogasi dan diperbolehkan berpakaian

¹³ *Op.Cit*, Lia Yulia, hal 285

¹⁴ *Ibid*, hal 286

- lagi jika interogasi berjalan lancar. Namun jika tidak, tahanan akan diancam dengan siksaan lainnya.
- g. *Sexual Humiliation*. Para tahanan dipaksa berhubungan seks sesama jenis, menari striptis dan penyiksaan-penyiksaan seksual lainnya yang dilakukan tentara Amerika agar para tahanan mau menjawab segala pertanyaan.
 - h. *Phobias*. Dikurung bersama-sama sesuatu yang tahanan takuti, seperti laba-laba, kalajengking, ular dan beberapa hewan lainnya agar tahanan mengalami rasa panic dan takut luar biasa.
 - i. *Cultural Humiliation*. Penghinaan verbal, pemaksaan makan babi atau makan makanan haram lainnya bagi tahanan muslim.
 - j. *Extreme Cold* atau *Hot Box*. *Extreme Cold* adalah jenis penyiksaan yang menggunakan bantuan alam atau alat yang bisa membuat tahanan merasa sangat kedinginan. Sedangkan *Hot Box* adalah jenis penyiksaan yang akan membuat tahanan merasa sangat kepanasan.
 - k. *Waterboarding*. Tubuh tahanan diikat pada sebuah papan atau meja dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala, lalu matanya ditutup. Kemudian wajah tahanan disiram dengan air berulang kali dengan teknik tertentu. Secara psikologi tahanan akan merasa tenggelam dan timbul reaksi tersedak. Karena air yang diguyurkan ke wajahnya. Metode ini sangat efektif karena percobaan yang dilakukan ke anggota CIA sendiri, ternyata rata-rata mereka bertahan selama 14 detik. Tapi belakangan metode ini dilarang digunakan dalam kemiliteran AS.

Hal ini membuktikan bahwa Konvensi Jenewa III Tahun 1949 belum berjalan sesuai dengan semestinya, begitu juga dengan ketentuan pokok Hak-Hak Asasi Manusia, pada Pasal 11 berbunyi “ setiap Negara pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, interuksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya. Fakta bahwa penguasa adalah pihak yang memiliki kekuatan karena kekuasaan dan kewenangan sehingga merupakan suatu konsekuensi logis mengawakan kewajiban untuk melindungi HAM dibebankan kepada penguasa (Negara) ¹⁵. Walaupun tidak diatur secara spesifik tentang perlindungan terhadap tahanan

¹⁵ Andrey Sujatmokko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 29

perang, akan tetapi tawanan perang terkadang tidak luput dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Kesimpulan

Konvensi Jenewa III adalah konvensi yang mengatur mengenai bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan atau angkatan bersenjata dari negara musuh yang aktif dalam peperangan. Konvensi ini mengatur adanya perlindungan hukum terhadap tawanan perang tersebut dan mengatur bagaimana negara penahan memperlakukan tawanan perangnya. Sehingga negara penahan tidak seenaknya memperlakukan tawanan perang tersebut. Dalam hal ini tidak menyiksa, membunuh, maupun melakukan balas dendam terhadap tawanan perang yang sudah tidak berdaya. Sehingga apa yang menjadi tujuan hukum humaniter bisa tercapai, yaitu meminimalisir korban dan mengurangi penderitaan berlebihan yang disebabkan oleh peperangan. Jadi, Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan *Declaration of Human Rights* mewajibkan setiap negara yang turut serta meratifikasi konvensi tersebut, agar menghindarkan diri dari segala bentuk penyiksaan dan mengawasi para aparat penegak hukum mulai dari interogasi hingga adanya putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencengah segala bentuk penyiksaaan terhadap tawanan perang demi penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

Saran

- a. Sebisa mungkin perang itu dihindari oleh suatu negara yang sedang mengalami konflik internal di dalam negaranya sendiri maupun konflik antar satu negara dengan negara lainnya agar penduduk sipil tidak menjadi korbannya seperti wanita, pria, maupun anak-anak yang masih kecil yang seharusnya bisa menjadi penerus cita-cita dari suatu negara tetapi harus menjadi korban pada usia yang masih sangat muda.
- b. Perang seharusnya tidak menjadi jalan penyelesaian dari konflik internal yang terjadi di dalam suatu negara ataupun konflik di antar negara. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan seperti perundingan maupun negosiasi yang dimana cara tersebut tidak menggunakan cara kekerasan yang dapat menyebabkan banyak penduduk sipil menjadi korban jiwa.

Daftar Pustaka

Andrey Sujatmokko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Arlina Permanasari et.al. *Pengantar Hukum Humaniter*, 1999, Jakarta: ICRC

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika

Lia Yulia, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2015

Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012

Konvensi Jenewa III Tahun 1949

Declaration of Human Rights